

**MODEL *PENTAHHELIX COLLABORATIVE GOVERNANCE*  
DALAM STRATEGI PEMBIAYAAN PROGRAM PEMBINAAN  
DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN  
NILAI-NILAI KEBANGSAAN DI LEMHANNAS RI**

Disusun Oleh :

NAMA : GATOT  
NPM : 2063001003  
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA  
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar  
Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.Ap)



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA  
PROGRAM MAGISTER TERAPAN  
TAHUN 2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Gatot  
NPM : 2063001003  
Jurusan : Administrasi Publik  
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara  
Judul Tesis : Model *Pentahelix Collaborative Governance* Dalam Strategi Pembiayaan Program Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Lemhannas RI  
Judul Tesis : The *Pentahelix Collaborative Governance* Model in Financing Strategy of Strengthening National Values Development and Implementation Program at Lemhannas RI

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis

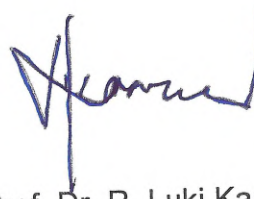
Jakarta, 13 Desember 2023

Pembimbing I



Dr. Hamka, MA

Pembimbing II



Prof. Dr. R. Luki Karunia, MA.

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN  
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

**LEMBAR PENGESAHAN**

NAMA : GATOT  
NPM : 2063001003  
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM STUDI : ADMINISTASI PEMBANGUNAN NEGARA  
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA  
JUDUL TESIS : MODEL *PENTAHHELIX COLLABORATIVE GOVERNANCE*  
DALAM STRATEGI PEMBIAYAAN PROGRAM  
PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN NILAI-  
NILAI KEBANGSAAN DI LEMHANNAS RI.

Telah mempertahankan Tesis di hadapan Penguji Tesis Program Magister Terapan  
Administrasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta, Lembaga Administrasi  
Negara, pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 18 Desember 2023  
Pukul : 14.30 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS.

PENGUJI TESIS:

Ketua Sidang : Dr. Bambang Giyanto, M.Pd.

Sekretaris : Dr. Firman Hadi Rivai, S.STP., MPA.

Anggota : Dr. Ridwan Rajab, M.Si.

Pembimbing 1 : Dr. Hamka, MA.

Pembimbing 2 : Prof. Dr. R. Luki Karunia, MA.



The right side of the document features five handwritten signatures in blue ink, each positioned above a horizontal dotted line. To the right of these signatures is the official circular seal of Politeknik STIA LAN Jakarta. The seal is blue and white, with the text 'POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA' around the perimeter and a central logo consisting of a stylized 'S' and 'L' intertwined within a shield-like shape.

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gatot  
NPM : 2063001003  
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara  
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang telah saya susun merupakan karya saya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari hasil penelitian Tesis ini merupakan hasil plagiat atau menjiplak karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan dan bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jakarta, Desember 2023



Gatot



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke khadirat Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat, Karunia serta Nikmat yang tidak terhingga, Shalawat serta Salam semoga senantiasa tercurah kepada Junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, utusan Allah yang membawa Cahaya Petunjuk kepada seluruh umat manusia, sehingga atas petunjuk Nya saya dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini, dalam rangka mendapatkan gelar akademik Magister Terapan (M.Tr.Ap) pada Politeknik STIA LAN Jakarta. Peneliti merasakan banyak sekali rintangan dan hambatan baik pada masa perkuliahan, dimana hampir selama masa perkuliahan dilaksanakan dengan cara daring, dan pada masa penulisan tugas akhir, serta ditengah kesibukan melaksanakan kewajiban sebagai pegawai. Namun Alhamdulillah berkat do'a dan dorongan semua pihak, karya tulis ini dapat terselesaikan.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dr. Hamka MA., dan Prof. Dr. R. Luki Karunia, MA. Dan semua pihak yang telah berusaha dan berupaya agar Tesis ini dapat terselesaikan yaitu:

1. Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos, MA. selaku Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta yang juga sekaligus dosen pengajar salah satu mata kuliah yang diambil peneliti;
2. Dr. Hamka MA. selaku pembimbing kesatu sekaligus dosen pada beberapa mata kuliah yang diambil peneliti, dimana telah meluangkan banyak waktu, menyumbangkan tenaga dan pikiran ditengah kesibukan mengajar, untuk memberikan bimbingan kepada peneliti dalam penyusunan tesis ini;
3. Prof. Dr. Luki Karunia, MA. selaku pembimbing kedua dan sekaligus dosen salah satu mata kuliah yang diambil peneliti, dimana telah

memberikan waktu, tenaga dan pikiran ditengah kesibukan mengajar dan memberikan bimbingan kepada peneliti dalam penyusunan tesis ini;

4. Seluruh Dewan Penguji mulai dari sidang proposal tesis, seminar hasil penelitian tesis dan sidang akhir tesis, yaitu : Dr. Bambang Giyanto, SH, M.Pd, Dr. Firman Hadi Rivai, S.STP., MPA, Dr. Ridwan Rajab, M.Si. dan Dr. Edy Sutrisno, M.Si. yang telah banyak memberikan saran, pendapat dan pemikirannya dalam penyusunan tesis ini;
5. Kepala Biro Humas Settama Lemhannas RI Brigjen TNI Suratno, S.I.P, yang telah memberikan kesempatan ijin belajar kepada peneliti sehingga peneliti berhasil mendapatkan gelar M.Tr.AP dari Politeknik STIA LAN Jakarta;
6. Atasan dan rekan-rekan di Biro Humas Settama Lemhannas RI, Atasan dan Rekan-rekan di Kedeputan Taplai Kbs. yang telah berkenan menjadi narasumber, sehingga peneliti mendapatkan informasi yang akurat, dan semoga informasi yang disampaikan dapat berguna di Lemhannas RI;
7. Seluruh Narasumber yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah memberikan informasi guna membantu peneliti dalam penyusunan Tesis;
8. Orang Tua dan Istri dan Anak serta para sahabat yang selalu mendoakan dan memberikan dorongan moral yang tidak ternilai kepada peneliti;
9. Seluruh Staf dan Sekretariat bidang akademik Politeknik STIA LAN Jakarta terutama Ibu Fida Faridanti dan Ibu Anita Nurseha yang telah dengan sangat sabar dan banyak membantu selama perkuliahan dan penyelesaian program studi ini;

10. Seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan namanya satu per satu, akhir kata, peneliti berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Peneliti menyadari bahwa Tesis ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan.

Jakarta, Desember 2023

Peneliti



Gatot

## ABSTRAK

### **MODEL PENTAHHELIX COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM STRATEGI PEMBIAYAAN PROGRAM PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN DI LEMHANNAS RI**

Gatot, Hamka, R. Luki Karunia

[gatotlh3@gmail.com](mailto:gatotlh3@gmail.com)

[Politeknik STIA LAN Jakarta](#)

Partisipasi para Stakeholder khususnya dari Media Massa dan para Pengusaha sangat berdampak signifikan dalam meningkatkan anggaran Pendidikan Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan (Taplai Kbs) yang dilakukan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI). Kegiatan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan sangat dibutuhkan peran aktif dari kalangan Non Pemerintah untuk berkolaborasi dalam mendukung pelaksanaannya Program Lemhannas RI.

Tujuan penelitian menjelaskan bagaimana evaluasi Lemhannas RI dalam mengidentifikasi dan menganalisis faktor penghambat dan pendukung, serta Strategi Pembiayaan Program Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Teori Pentahelix, Collaborative Governance, Manajemen Keuangan, Anggaran dan Analisis SWOT. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tehnik pengumpulan data wawancara dengan 9 Key Informant, Observasi lapangan dengan melakukan pengamatan langsung di Lemhannas RI dan Telaah Dokumen sebagai data dukung dalam penyempurnaan data. Hasil penelitian menggambarkan bahwa Program Pembinaan dan Pelaksanaan yang dilaksanakan Lemhannas RI yang menggunakan dana APBN belum optimal terbukti dari masih rendahnya anggaran yang disediakan dalam program tersebut, yang disebabkan beberapa faktor antara lain kurangnya pemahaman tugas dan fungsi Lemhannas RI oleh pihak Bappenas dan Kementerian Keuangan RI, dasar pembentukan Lemhannas RI masih menggunakan Peraturan Presiden RI, serta tidak termasuk dalam Program Pendidikan Nasional yang mendapatkan 20% dana APBN Pendidikan, sehingga membutuhkan strategi dan kolaborasi dalam meningkatkan anggaran Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan. Saran, bahwa hasil dari penelitian ini bisa direkomendasikan kepada Lemhannas RI sebagai Solusi dalam menentukan Strategi Pembiayaan Program anggaran Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan, dan diperlukan penelitian lanjutan guna merumuskan strategi yang lebih tepat dan tajam.

**Kata Kunci** : Pembiayaan, Kolaborasi, Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan.



## ABSTRACT

### **PENTAHELIX COLLABORATIVE GOVERNANCE MODEL IN FINANCING STRATEGY DEVELOPMENT PROGRAM AND IMPLEMENTATION OF CONSTRUCTION NATIONAL VALUES IN LEMHANNAS RI**

Gatot, Hamka, R. Luki Karunia

[gatotlhn3@gmail.com](mailto:gatotlhn3@gmail.com)

[Politeknik STIA LAN Jakarta](#)

*The participation of stakeholders, especially from the mass media and entrepreneurs, has had a significant impact in increasing the education budget for the development and implementation of strengthening national values (Taplai Kbs) carried out by the National Resilience Institute of the Republic of Indonesia (Lemhannas RI). Activities for Strengthening National Values really require an active role from non-governmental groups to collaborate in supporting the implementation of the Lemhannas RI Program.*

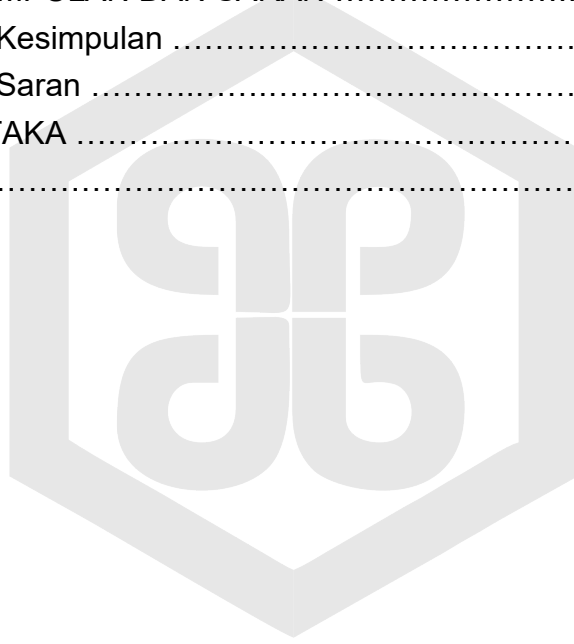
*The aim of the research is to explain how Lemhannas RI evaluates in identifying and analyzing inhibiting and supporting factors, as well as the Financing Strategy for Development and Implementation Programs for Strengthening National Values. The theory used in this research uses the Pentahelix Theory, Collaborative Governance, Financial Management, Budgeting and SWOT Analysis. The research method used is a qualitative research method using interview data collection techniques with 9 Key Informants, field observations by conducting direct observations at Lemhannas RI and document review as supporting data for data refinement. The research results illustrate that the Development and Implementation Program implemented by Lemhannas RI using APBN funds is not optimal, as evidenced by the low budget provided for the program, which is caused by several factors, including a lack of understanding of Lemhannas RI's duties and functions by Bappenas and the Indonesian Ministry of Finance, The basis for the formation of Lemhannas RI still uses the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia, and is not included in the National Education Program which receives 20% of APBN Education funds, so it requires strategy and collaboration in increasing the budget for Strengthening National Values. The suggestion is that the results of this research can be recommended to Lemhannas RI as a solution in determining the Financing Strategy for the National Values Strengthening Budget Program, and further research is needed to formulate a more precise and sharp strategy.*

*Keywords: Financing, Collaboration, Strengthening National Values.*

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
<b>BAB I PERMASALAHAN PENELITIAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identitas Masalah .....	30
C. Rumusan Masalah .....	32
D. Tujuan Penelitian .....	33
E. Manfaat Penelitian .....	34
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>35</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	35
B. Tinjauan Kebijakan dan Teoritis .....	39
1. Tinjauan Kebijakan .....	39
2. Tinjauan Teoritis .....	45
C. Kerangka Berfikir .....	83
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>
A. Metode Penelitian .....	87
B. Teknik Pengumpulan Data .....	89
C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	95
D. Analisis Penelitian .....	98
E. Instrumen Penelitian .....	99
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>102</b>
A. Profil Lembaga Ketahanan Nasional RI .....	102
B. Penyajian Dam Analisis Data .....	118
1. Faktor Penghambat .....	119

2. Faktor Pendukung .....	156
C. Model Kolaborasi .....	177
D. Strategi .....	180
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....	187
A. Kesimpulan .....	187
B. Saran .....	189
DAFTAR PUSTAKA .....	191
LAMPIRAN .....	



**POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Prioritas Lemhannas RI yang berlanjut Tahun 2023 .....	13
Tabel 1.2	Esensi Pemahaman Nilai-nilai Kebangsaan .....	16
Tabel 1.2a	Esensi Pemahaman Nilai-nilai Kebangsaan .....	17
Tabel 1.3	Data Tindakan Intoleransi dan Radikalisme .....	18
Tabel 1.4	Tindakan Korupsi oleh Pejabat Publik Selama 2021 .....	21
Tabel 2.1	Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Peran Para Pihak .....	66
Tabel 2.2	Metriks Analisis SWOT .....	77
Tabel 3.1	Daftar Key Informant Penelitian .....	94
Tabel 3.2	Teknik Pengumpulan Data Penelitian .....	100
Tabel 4.1	Peran Para Pihak dalam Strategi Pembiayaan .....	176
Tabel 4.2	Rekomendasi Tahapan Strategi yang harus dilakukan .....	184

POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	10 Besar Provinsi dengan Pelanggaran Toleransi .....	19
Gambar 1.2	Jumlah Alumni Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan .....	26
Gambar 1.3	Percepatan dan Perluasan Taplai Kebangsaan .....	28
Gambar 2.1	Bagan Kerangka Penelitia .....	85
Gambar 3.1	Komponen Dalam .....	96
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Lemhannas RI .....	106
Gambar 4.2	Struktur Organisasi Deputi Pemantapan .....	108
Gambar 4.3	Model Kolaborasi Lemhannas RI .....	179
Gambar 4.4	Strategi Peningkatan Anggaran Program .....	183

**POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A**

## **BAB I**

### **PERMASALAHAN PENELITIAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman terbanyak di dunia, selain berada pada posisi ke-4 negara dengan penduduk terbesar di dunia dengan populasi sebanyak 272.682.500 Jiwa yang berada diantara 17.404 pulau dan terdiri dari 1.340 Suku/etnik. ([www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id) Ditjen Dukcapil, (2022) Jumlah penduduk di Indonesia tahun 2022). Pada dasarnya keragaman yang pada bagian kekayaan yang dapat menjadi keunggulan dalam pembangunan nasional. Pada bagian lainnya hal tersebut mengakibatkan terjadinya instabilitas apabila tidak diurus dengan baik dapat berdampak buruk yang akan menimbulkan terhambatnya pembangunan nasional. Salah satu pilar pembangunan Indonesia adalah membangun manusia Indonesia yang unggul, berbudaya, serta adaptif serta menguasai pengetahuan dan teknologi, Idealnya Indonesia memiliki sumber daya yang sangat besar dalam mendukung berjalannya pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan nasional sendiri harus didukung oleh terbangunnya ekosistem yang kondusif dan mantapnya nilai-nilai kebangsaan pada komponen-komponen bangsa. Sehingga Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan (Taplai Kbs) bertujuan membangun karakteristik bangsa, membangun rasa, semangat dan jiwa kebangsaan (nasionalisme), membangun kesadaran terhadap system nasional dalam mengelola keberlangsungan berbangsa dan bernegara yang bersumber pada 4 konsensus dasar bangsa Indonesia yaitu Pancasila, UUD RI 1945, Sesanti Bhinneka Tunggal Ika serta NKRI yang penuh akan nilai luhur terasa terpinggirkan sejak keran demokrasi terbuka lebar dalam system ketatanegaraan Indonesia. ([www.lemhannas.go.id](http://www.lemhannas.go.id) Lemhannas selenggarakan

Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan (Taplai Kbs) secara virtual).

Nilai spiritual leluhur yang tinggi yang diinterpretasikan sebagai nilai kebangsaan yang berasal dari 4 konsesus dasar sebagai nilai yang disepakati oleh *founding father* bangsa Indonesia saat ini menjadi unsur penting yang harus dimengerti, dan diamalkan dalam berkehidupan di masyarakat, dimana dalam beberapa waktu kebelakang tengah mengarah pada kehidupan yang mementingkan kepentingan pribadi (Individulistik) yang berorientasi pada materi (materialistic) sehingga mengakibatkan aspek-aspek kebangsaan semakin jauh dari jati diri bangsa, dimana berdasarkan fakta di lapangan indeks ketahanan nasional tahun 2021 menunjukkan angka penurunan pada gatra-gatra tertentu yang berhubungan dengan ditinggalkannya nilai-nilai agung yang berasal dari 4 kesepakatan dasar kehidupan nasional Indonesia perkembangan Astagatra di Indonesia telah mengalami beberapa kemunduran dan dalam kondisi yang memprihatinkan. (Indeks Ketahanan Nasional 2021, Lembaga Ketahanan Nasional).

Beberapa permasalahan dari perkembangan aspek kehidupan yang muncul di Indonesia dalam beberapa prespektif disebabkan cepatnya perubahan sosial akibat kemunculan era *post truth* yang muncul akibat arus informasi yang semakin terbuka dengan adanya teknologi internet. Namun fasilitas yang telah di akomodasikan oleh internet ternyata tidak menjamin terbukanya pemikiran seseorang. Faktanya justru kondisi dalam beberapa waktu terakhir akibat perkembangan internet berdampak pada banyaknya muncul narasi prasangka-prasangka yang kerap kali muncul akibat pemberitaan palsu (Hoax). ([www.kompas.com](http://www.kompas.com) Laksono Hari Wiwoho 2019)

Hoax yang kemudian berkembang dan mengarah kepada ujaran-ujaran kebencian yang muncul dengan memanfaatkan media internet

merupakan ancaman laten yang muncul sepanjang tahun. Data Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) tahun 2019, 87,50 % informen mengaku menerima hoax melalui medsos dan 67% melalui aplikasi Chatting. Tema hoax yang paling banyak diperoleh informen adalah tema sosial-politik (93,20%), dan pemerintah (61,70%). Isu-isu yang berkembang seperti politik identitas akan diperparah dengan system “*algoritma*” pada platform media sosial yang memiliki system *filter bubble* berdampak pada hoax dan ujaran kebencian menyebabkan pengguna media sosial maupun media online terperangkap dalam ruang gema (*Echochamber*) yang semakin mempengaruhi emosi pengguna media sosial dalam menyikapi sebuah informasi yang muncul.

Narasi nilai-nilai kebangsaan yang tereduksi oleh dampak negatif media sosial dan internet juga diperparah dengan tingkat literasi digital masyarakat yang belum merata dan menyebabkan masyarakat yang belum memiliki standart untuk memilah dan mengevaluasi secara kritis informasi yang membanjiri media sosial seperti Facebook, Instagram, Youtube hingga aplikasi percakapan seperti Whatsapp, Line dan Telegram. Padahal berpikir kritis menjadi sebuah syarat penting dalam menerima dan mengelola informasi yang diterima bila informasi tersebut tidak berasal dari sumber seperti media pers (yang selalu dituntut melakukan verifikasi sebelum menyebar sebuah berita). (Septiaji Eko Nugroho (2021), Jurnal Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada).

Beberapa hal tersebut dapat di interpretasikan bahwa terdapat mispersepsi dan adanya paham yang berbeda sehingga menimbulkan konflik kepentingan yang terjadi pada tataran elit yang merupakan dampak dari adanya perbedaan visi dalam Tata Kelola sistem kenegaraan, hal tersebut kemudian berakibat pada mudahnya merambah dalam kehidupan masyarakat “*grass root*” (Masyarakat tingkat bawah) dan ternyata



konsekuensi tersebut berdampak negatif pada hubungan sosial masyarakat yang kemudian menciptakan segmentasi pada masyarakat yang terbagi menjadi kelompok tertentu maupun sentiment berlatar belakang kedaerahan, religiusitas hingga ideologis, berdampak pada kondisi persatuan menjadi berkurang dan kesatuan bangsa menjadi semakin merenggang. Di lain sisi, terjadi konflik kepentingan golongan/politik yang jadi hambatan besar bagi kemajuan bangsa, karena proses pembangunan nasional terabaikan sebagai upaya peningkatan taraf hidup bangsa guna mencapai mimpi masyarakat yang adil dan Makmur, berlandaskan beberapa fakta tersebut dapat di tafsirkan bahwa terdapat degradasi nilai-nilai kebangsaan di kalangan masyarakat, sehingga untuk mereduksi dan mencegah semakin meluasnya hal tersebut maka diperlukan Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan (Taplai Kbs) pada seluruh lapisan masyarakat sehingga dapat mendukung pembangunan nasional.

#### **Data dan Fakta**

Dihadapkan dengan berbagai fenomena yang telah dijelaskan di awal, beberapa data dan fakta yang berkaitan dengan masih lemahnya pemahaman nilai-nilai kebangsaan pada komponen bangsa dalam upaya mendukung pembangunan nasional dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- 1. Lemahnya pemahaman nilai-nilai kebangsaan pada komponen bangsa.** Indikator lemahnya pemahaman nilai-nilai sebagaimana yang disampaikan oleh Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik Kementrian dalam Negeri (Kesbangpol Kemendagri) yang menyampaikan bahwa maraknya penyebaran Hoax dan ujaran kebencian (*Hate Speech*) merupakan salah satu indicator bahwa pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan yang lemah.

([www.kesbangpol.kemendagri.go.id](http://www.kesbangpol.kemendagri.go.id) Kesbangpol (2021) Hoax dan ujaran kebenci dan factor utama dalam disintegrasi bangsa). Dimana hoax dan ujaran kebencian merupakan penyebab utama dari disintegrasi, penyebaran hoax dan ujaran kebencian yang berhasil dihimpun diantaranya adalah sebagai berikut: ([www.kominfo.go.id](http://www.kominfo.go.id), Kominfo (2022) Kominfo Blokir 565.449 Konten berisi hoax dimedia social sepanjang 2022).

a. **Penyebaran Hoax.** Sepanjang tahun 2021, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menemukan sekitar 565.449 konten bermuatan hoax yang tersebar di Media sosial, media online hingga penyedia layanan *chat*/pesan. Sebaran hoax tersebut berasal dari beberapa platform dengan sebaran sebagai berikut :

1) **Facebook.** Platform Facebook memiliki sebaran hoax sebanyak 35% yang merupakan platform media sosial yang memiliki sebaran hoax terbanyak, pola sebaran yang dilakukan, sebagaimana yang disebutkan oleh Kominfo 25% memiliki latar belakang pekerjaan di Instansi Pemerintah, 35% dari sektor swasta, di sector Pelajar 20% dan 20% berasal dari *fake account* (akun palsu).

2) **Media Massa Online.** Dengan kemajuan teknologi informasi dan fasilitas memudahkan untuk membuat sebuah portal berita, saat ini banyak tersebar media massa online yang

kerap kali memuat dan menuliskan berita dengan isi hoax, menurut Kominfo media massa online memiliki sebaran hoax sebesar 35%.

3) **Whatsapp.** Platform whatsapp merupakan media yang memfasilitasi seseorang untuk terkoneksi dengan orang lain melalui media perpesanan (*chat*) maupun telpon, whatsapp juga memiliki beberapa fasilitas penunjang seperti "*Grup Chat*" hingga "*Story*" yang mampu dilihat dengan mudah dengan orang lain yang telah terkoneksi, namun salah satu fasilitas whatsapp yaitu "*Group Chat*" kerap kali disalahgunakan sebagai media penyebar hoax paling efektif, Kominfo menyebutkan bahwa grup chat whatsapp menjadi platform paling efektif dalam tersebarnya hoax sepanjang 2020-2021. Bahkan parahnya hampir 65% pengguna Whatsapp mempercayai berita yang disebarkan melalui grup whatsapp. Platform ini sendiri memiliki sebaran hoax sebanyak 15%.

4) **Instagram.** Platform Instagram memiliki sebaran hoax sebanyak 15% berbeda dengan Facebook yang diketahui latar belakang identitas penyebar hoax, Kominfo tidak merilis latar belakang dari pengunggah hoax yang berasal dari akun Instagram, namun Kominfo

menyebutkan bahwa hampir 35% penyebar berita hoax di Instagram adalah *Fake Account*.

b. **Ujaran Kebencian.** Ujaran kebencian-kebencian memiliki hubungan terkorelasi dengan hoax, dimana hoax yang muncul di berbagai platform juga kerap kali berisi ujaran kebencian, menurut Kominfo yang telah bekerjasama dengan Facebook (Facebook juga menjadi pemilik dari beberapa media sosial lain seperti Instagram dan Whatsapp) yang telah medelete sebanyak 25.2 juta konten yang berisi uraian kebencian, dimana ada kurang lebih 96.8% dikenali dengan system aplikasi *Artificial Intelligent*, sebagaimana yang dirilis oleh Kompas, beberapa muatan ujaran kebencian yang berhasil diidentifikasi sebagai berikut (www.kompas. Com Conney Stephanie (2022) Facebook hapus 25 Juta konten ujaran kebencian selama tahun 2021):

- 1) **Pelecehan.** Sebanyak 8.8 juta konten teridentifikasi memuat pelecehan yang ditujukan kepada individu, kelompok hingga institusi.
- 2) **Kebencian Terorganisi.** 9.8 juta konten teridentifikasi memuat unggahan yang terorganisir untuk menjatuhkan individu, kelompok hingga institusi dengan tujuan tertentu, dalam konteks ini motif unggahan



berorientasi kepada isu politik dan pemerintahan.

- 3) **SARA.** 6.7 Juta konten teridentifikasi memuat unggahan yang menyinggung serta bermuatan unsur SARA (suku, agama, ras dan antar golongan), unggahan bias mengandung unsur pelecehan dan kebencian terorganisir yang memuat isu politik.

2. **Lemahnya implementasi nilai-nilai kebangsaan.** Dalam konteks lemahnya implementasi nilai-nilai kebangsaan dapat dikategorikan menjadi beberapa indikator, sebagaimana deskripsi berikut:

- a. **Fenomena yang tidak sesuai demokrasi.** Kualitas demokrasi Indonesia dalam separuh decade terakhir cenderung menurun berdasarkan data Indeks Demokrasi Indonesia BPS (Badan Pusat Statisti). Pada tahun 2021, demokrasi Indonesia menghadapi dua masalah : pembatasan kebebasan sipil dan melemahnya oposisi, dimana keanggotaan beberapa partai oposisi di kabinet pemerintah menyebabkan melemahnya *checks and balances* serta fungsi control sosial atas pemerintah, namun data Indeks Demokrasi Indonesia Badan Pusat Statistik menyebutkan beberapa fenomena yang tidak sesuai demokrasi terjadi selama satu decade terakhir terkait dengan deskripsi sebagai berikut :

1) **Politik Identitas.** Dalam satu decade terakhir politik identitas menjadi momok tersendiri bagi system demokrasi di Indonesia, dimana dalam beberapa kali kontestasi politik Indonesia yang memuncak pada Pemilu 2019, politik identitas menjadi salah satu pemicu dari munculnya polaritas yang didasarkan oleh salah satu identitas tertentu baik itu identitas agama, suku maupun golongan tertentu yang menimbulkan *In group-out grup* (kelompok lain yang bukan menjadi bagian dari kelompok sendiri dapat dilawan dan dianggap salah) pada sebuah kontestasi demokrasi di Indonesia, dan dengan kemunculan politik identitas menyebabkan tereduksinya nilai-nilai demokratis yang menjadi asas dan dasar sebuah pemilu.

2) **Money Politik (Politik Uang).** Politik uang menjadi salah satu fenomena yang menjadi primadona dalam setiap gelaran pemilu di Indonesia, dan fenomena ini semakin memuncak dalam satu decade terakhir, fenomena ini selalu menggunakan kekurangan kesejahteraan masyarakat, sehingga cukup mudah untuk di peralat, berdasarkan data BPS perilaku ini semakin tinggi pada setiap kontestasi politik.

b. **Fenomena yang tidak sesuai persatuan bangsa.**  
Indikator ini dari fenomena ini adalah adanya konflik

yang didasarkan pada unsur SARA, dimana konflik disebabkan karena mudahnya massa terprovokasi dengan berbagai hal sebagai berikut :

1) **Kerusakan Fak-fak.** Pada tahun 2019 terjadi kerusuhan yang pecah di beberapa wilayah seperti yang terjadi di Kabupaten Fak-fak, Prov. Papua Barat, terbakar kantor Dewan Adat dan Pasar Thumburuni di Kab. Fak-fak. Pemicu kerusuhan kelanjutan atas demo pada rasisme terhadap seorang Mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur, dimana sebelum beredar luas video hoax yang menunjukkan adanya Tindakan rasial yang dilakukan oleh masyarakat terhadap Mahasiswa Papua, hal tersebut kemudian dilakukan Tindakan “Balasan terhadap orang yang bukan asli Papua”.

2) **Kerusuhan Wamena.** Pada tahun 2019 terjadi Kembali kerusuhan yang terjadi akibat hoax rasisme, kerusuhan Wamena disebabkan kabar hoax akibat seorang pengajar berucap kalimat rasis di tempat belajar mengajar, hoax ini menimbulkan balasan dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dengan membakar dan menghancurkan rumah-rumah pendatang yang berasal dari daerah tertentu. Akibat kerusakan itu sebanyak 33 orang meninggal. Sejumlah 224 mobil roda 6 dan 4 terbakar, 150 roda dua, 465

toko terbakar, dan 165 tempat tinggal ludes dimakan sijago merah.

- 3) **Konflik Politik Identitas Pemilu 2019.** Pemilu 2019 yang mewarnai demokrasi di Indonesia berdampak pada polarisasi sepanjang 2019 hingga tahun 2020, terlebih saat pemilihan Presiden muncul istilah “Cebong” dan “Kampret” yang melabeli pendukung masing-masing calon Presiden, istilah ini kemudian menjadi polarisasi besar-besaran khususnya pasca kemenangan salah satu kontestan, kerusuhan terjadi di beberapa wilayah dan mengakibatkan korban jiwa.
- 4) **Konflik Politik Identitas Pilkada 2020.** Politik identitas masih menjadi salah satu metode kampanye pasca Pilpres 2019, hal ini dibuktikan dengan adanya evolusi istilah yang muncul pada pendukung beberapa calon yang berasal dari golongan partai tertentu, pada masa ini istilah yang muncul adalah “Kadrun” Istilah ini ditujukan kepada pendukung pihak yang berpenampilan “kearab-araban” dan ditujukan pada salah satu ormas keagamaan, dampak dari adanya julukan tersebut menimbulkan konflik di beberapa wilayah yang mengakibatkan korban jiwa.
- 5) **Konflik Antar Ormas.** Pada tahun 2021 terjadi beberapa konflik antar Ormas (Organisasi Masyarakat) dan yang paling viral adalah konflik



antara ormas PP dengan FBR di Ciledug Tangerang, konflik ini didasarkan pada kepentingan antar golongan yang di indikasikan terkait lahan parkir yang dikelola oleh ormas tersebut.

- c. **Fenomena yang tidak sesuai Toleransi.** Salah satu penyebab timbulnya konflik maupun pudarnya nilai-nilai kebangsaan salah satunya adalah Intoleransi. Intoleransi adalah kebalikan dari toleransi. Oleh karena itu, perilaku yang tidak sesuai dengan standart yang tertuang dalam empat konsensus bangsa, dimana Intoleransi merupakan sebuah tindakan yang mengancam aspek keragaman yang Indonesia miliki, sehingga pada dasarnya empat konsensus dasar yang merupakan ideologi tengah (moderat) adalah landasan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

3. **Lemahnya dukungan anggaran untuk melaksanakan Pembinaan dan Pelaksanaan Taplai Kbs.** Pada Program Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan (Taplai Kbs) tentunya dibutuhkan alokasi anggaran khusus atau cukup besar karena jumlah penduduk Indonesia dan luasnya wilayah jangkauan penyebarannya.

**Tabel 1.1**  
**PRIORITAS LEMHANNAS RI**  
**YANG AKAN BERLANJUT PADA TA 2023**  
(DALAM RIBU RUPIAH)

NO	KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN							
		2020		2021		2022		2023	
		OUTPUT (ORG)	ANGGARAN (RP)	OUTPUT (ORG)	ANGGARAN (RP)	OUTPUT (ORG)	ANGGARAN (RP)	OUTPUT (ORG)	ANGGARAN (RP)
1	Taplai Kbs	200	2.060.000	100	1.662.871	600	3.073.301	400	5.851.501
2	ToT Pemantapan Nilai- Nilai Kbs	200	2.390.000	100	1.559.366	600	3.785.537	400	5.932.175
3	Sosialisasi Taplai/Dialog Wasbang	190	1.206.000	1400	1.200.000	200	1.620.537	3700	2.341.000
	<b>Jumlah</b>	<b>590</b>	<b>5.656.000</b>	<b>1600</b>	<b>4.422.237</b>	<b>1400</b>	<b>8.479.375</b>	<b>4500</b>	<b>14.124.676</b>

*Sumber: Lemhannas RI*

Untuk mengakomodir kebutuhan dan permintaan masyarakat agar mendapatkan pendidikan di Lemhannas RI, tentunya sampai saat ini Lemhannas RI menawarkan biaya pendidikan ditanggung oleh APBN/DIPA K/L, APBD dan swadaya peserta didik karena kegiatannya tidak didukung oleh APBN/DIPA Lemhannas RI yang jumlahnya sangat terbatas. Penerapan pengelolaan perencanaan keuangan yang efektif dan efisien menurut deklarasi United Nations Development Program (UNDP) menunjukkan bahwa salah satu ciri yang menandai terselenggaranya good governance adalah prinsip efektivitas dan efisiensi. Namun realitas anggaran yang ada saat ini masih terbatas sehingga menimbulkan kesulitan bagi pengelola anggaran.

Mengingat tantangan Indonesia ke depan semakin berat perlu kiranya untuk menjaga nilai-nilai kebangsaan kepada komponen bangsa agar bangsa Indonesia dapat mengatasi segala macam ancaman. Guna

mendukung pembangunan nasional, dimana manfaat yang diharapkan melalui Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan (Taplai Kbs) dapat terbentuk dari masyarakat yang berakhlak, berkarakter, serta beretika bangsa yang pasti dan stabil, berubah menjadi falsafah hidup bangsa dengan empat konsensus dasar bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai harapan berkehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan (Taplai Kbs) adalah usaha mensosialisasikan, meninternalisasikan dan pelembagaan yang termenejemen dengan system aktif pendidikan dan pelatihan dua arah, dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Hal ini untuk meningkatkan pemahaman dan implementasi konsep-konsep membangun keberanian bangsa dan membangun sistem kenegaraan yang bersifat sustainable, sehingga rantai pewarisan nilai-nilai luhur kebangsaan merupakan salah satu bentuk dari pendidikan dan pelatihan kewarganegaraan dalam guna membentuk karakter/jati diri bangsa.

Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan (Taplai Kbs) bukan semata-mata dipandang sebagai tujuan, tetapi juga instrumen pembentukan jenis manusia yang ingin dilahirkan. Dengan demikian program Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan (Taplai Kbs) yang akan dikembangkan adalah yang menghargai proses, responsif, dan fleksibel dalam menjawab tantangan zaman. Kunci utama bagi terselenggaranya Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan (Taplai Kbs) model itu adalah adanya penghargaan terhadap daya pikir, kreasi, dan pengalaman individu yang dikaitkan dengan konteks tanggung jawabnya sebagai insan yang berdimensi spiritual maupun material. Dalam konteks ini, aktualisasi diri diukur bukan semata-mata secara empirik dan faktual tetapi juga mental. Berdasarkan pemikiran itu, maka Pedoman Pembinaan dan Pelaksanaan

Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan (Taplai Kbs) ini dirancang sebagai suatu Pedoman yang terbuka dan responsive terhadap perubahan, serta menghargai proses bagi lahirnya agen-agen perubahan yang berintegritas dan berkarakter Indonesia. (Pergub Lemhannas RI Nomor 09 Tahun 2021 tentang Pedoman Taplai 2021).

Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan (Taplai Kbs) memiliki peranan strategis dalam membentuk kesadaran dalam membangun pribadi yang kokoh sebagai bangsa dan mempunyai kepekaan terhadap pola kenegaraan yang di impikan dan disepakati bersama, namun berdasarkan fakta dilapangan, dengan masih maraknya penyebaran hoax dan ujaran kebencian yang melibatkan komponen bangsa menandakan bahwa implementasi nilai-nilai kebangsaan pada komponen-komponen bangsa telah memudar bahkan dalam beberapa kasus terjadi di lembaga negara, oleh karena itu diperlukan analisis terhadap permasalahan tersebut dengan pisau analisis teori peran, teori integrasi, teori pemahaman, teori implementasi dan teori keteladanan.

Keberhasilan Pembangunan Nasional sampai pada target jika dimenej oleh SDM yang berkarakter dan berkualitas sesuai dengan empat nilai konsensus dasar bangsa. Memahami akan pentingnya nilai kebangsaan yang bersumber dari empat kesepakatan dasar bangsa, hal ini adalah proses lama, dan perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terpadu merupakan usaha dalam memperbesar semua aspek kehidupan sosial, bangsa, dan negara, dengan pemahaman nilai-nilai tersebut sebagaimana table berikut.

**Tabel 1.2**  
**Esensi Pemahaman Nilai-Nilai Kebangsaan**

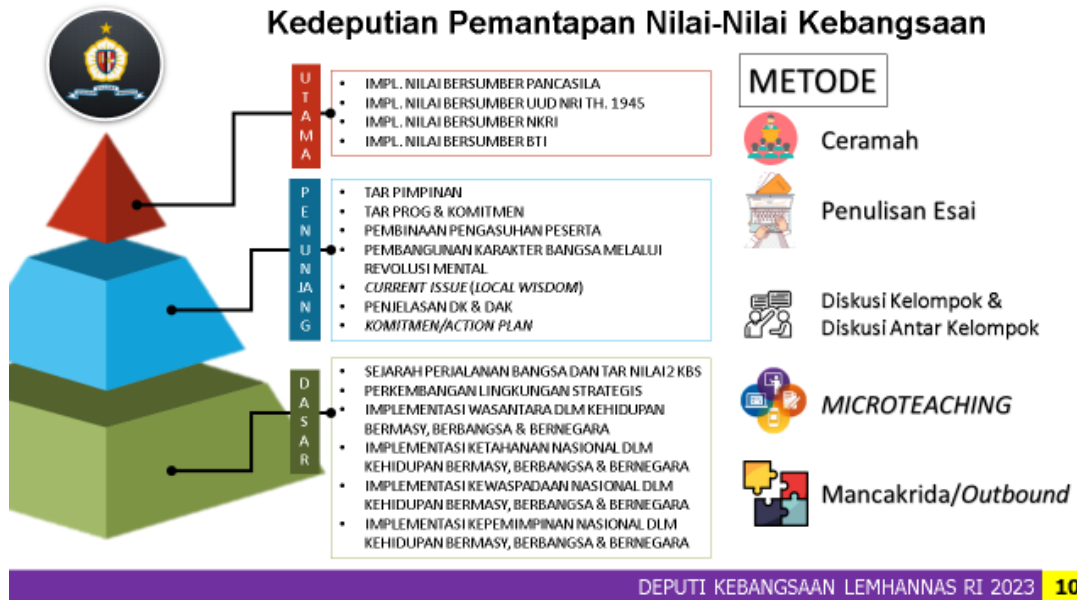
No.	Sumber	Esensi nilai-nilai	Kristalisasi nilai-nilai
1.	Pancasila	1. Nilai Religius 2. Nilai kekeluargaan 3. Nilai Kelarasan 4. Nilai Kerakyatan 5. Nilai Keadilan	1. Ketuhanan 2. Kemanusiaan 3. Persatuan 4. Demokrasi 5. Keadilan
2.	UUD 1945	1. Demokrasu 2. Kesamaan Drajat 3. Ketaatan Hukum	6. Plurais & Multikulturalis 7. Patriotis
3.	NKRI	1. Kesatuan Wilayah 2. Persatuan Bangsa 3. Kemandirian	
4.	Sesanti Bhinneka Tunggal Ika	1. Toleransi 2. Keadilan 3. Gotong Royong	

Sumber: Hasil Kajian Kedeputian Pemantapan Nilai Nilai Kebangsaan, 2021

Hakikat pemahaman akan nilai-nilai kebangsaan dalam memahami keberagaman merupakan prinsip yang sangat mendasar dan penting dalam masyarakat Indonesia. Kebangsaan merupakan ikatan kuat yang menjadi landasan kuat kerjasama antar warga/penduduk suatu negara. Di Indonesia, nilai-nilai kebangsaan tersebut dipraktikkan dalam empat pilar negara: Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Binneka Tunggar Ika. Berdasarkan hasil kajian Lemhannas RI menuangkannya kedalam Tabel 1.2. sebagai landasan akan nilai-nilai kebangsaan dalamberbangsa dan bernegara.

Tabel 1.2a

Esensi Pemahaman Nilai-Nilai Kebangsaan



Sumber: Kedeputian Pemantapan Nilai Nilai Kebangsaan, 2023

Berdasarkan Rumusan dan Kajian yang dilakukan oleh Kedeputian Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan Lemhannas RI, maka hasil kajian yang sebelumnya dikembangkan kembali untuk jadi bahan pembelajaran dalam program Taplai Kbs. yang disesuaikan berdaarkan kelompok yaitu Kelompok Utama, Kelompok Penunjang, dan Kelompok Dasar, serta dengan Metode Pembelajarannya yang juga dikelompokkan menjadi beberapa Model seperti Cramah, Penulisan Esai, Diskusi Kelompok dan Diskusi Antar Kelompok, Microteaching, dan Mancakrida/Outbound yang tertuang kedalam Table 1.2a.



**Tabel 1.3**  
**Data Tindakan Intoleransi & Radikalisme pada Lembaga Negara**

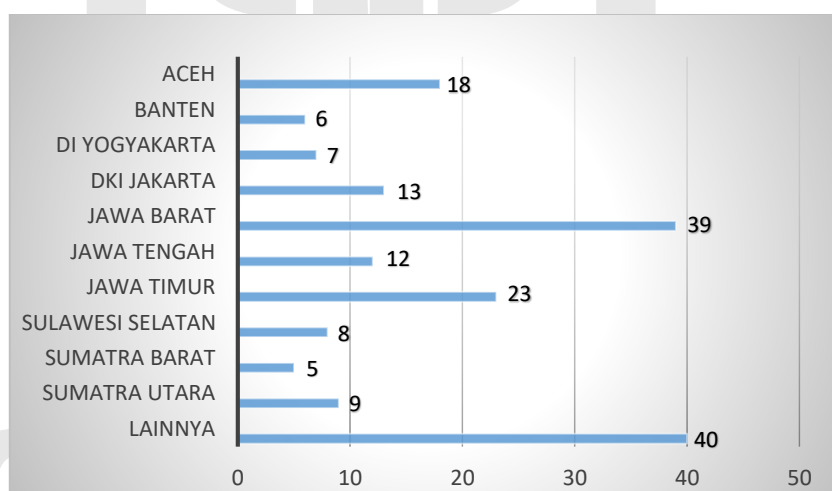
No.	Tahun	Jenis Pelanggaran	Jumlah Aduan
1.	2019	1. Intoleransi 2. Anti-Pancasila 3. Anti-NKRI 4. Radikalisme	1. Intoleransi 35 aduan 2. Anti-Pancasila 5 aduan 3. Anti-NKRI 27 laporan 4. Radikalisme 16 aduan
2.	2020	1. Intoleransi 2. Anti-Pancasila 3. Anti-NKRI 4. Radikalisme	1. Intoleransi 25 aduan 2. Anti-Pancasila 5 aduan 3. Anti-NKRI 24 laporan 4. Radikalisme 10 aduan
3.	2021	1. Intoleransi 2. Anti-Pancasila 3. Anti-NKRI 4. Radikalisme	1. Intoleransi 15 aduan 2. Anti-Pancasila 0 aduan 3. Anti-NKRI 5 laporan 4. Radikalisme 15 aduan

Sumber: Kominfo & aduasn.id (2021)

Tabel berikut tersebut merupakan data hasil reduksi dari rilis yang dikeluarkan oleh Kominfo dengan sumber yang berasal dari aduasn.id yang merupakan platform aduan bagi ASN (Aparatur Sipil Negara) yang berada dalam lingkup Lembaga Negara, termasuk di dalamnya melingkupi beberapa Kementerian, dimana laporan tersebut merupakan sebuah aplikasi pelaporan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengawasi kinerja ASN dalam lingkup kementerian negara, berdasarkan data tersebut dapat diinterpretasikan bahwa Lembaga Negara menjadi salah satu sasaran potensial bagi penyebaran paham anti Pancasila dan Radikalisme, dan dapat diasumsikan dengan adanya oknum ASN yang melakukan

pelanggaran tersebut, maka pemahaman nilai-nilai kebangsaan dan integrasi nasional dalam lingkup Lembaga negara belum optimal. Kemudian dalam aspek Lembaga masyarakat, diketahui beberapa temuan hasil Analisa sebagaimana gambar berikut :

**Gambar 1.1**  
**10 Besar Provinsi dengan Pelanggaran Toleransi di Indonesia**



Sumber : Setara Institute, 2021

Berdasarkan gambar diatas dapat di interpretasikan bahwa beberapa Tindakan intoleransi yang dilakukan masyarakat, pelanggaran tertinggi tersebar di sepuluh provinsi dan Jawa Barat sebagai Provinsi dengan indikator dan jumlah pelanggaran tertinggi (39 indikator dan jumlah pelanggaran), dari 10 provinsi tertinggi terjadinya intoleransi tersebut mayoritas sendiri dari provinsi-provinsi besar yang dimiliki heterogenitas tinggi, dan terdapat sebelas jenis Tindakan yang menjadi salah satu Tindakan pelanggaran toleransi tertinggi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, dan Tindakan diskriminasi menjadi salah satu Tindakan paling

banyak dilakukan. Berdasarkan data tersebut dapat di asumsikan bahwa pemahaman nilai-nilai kebangsaan yang dilakukan oleh masyarakat masih tergolong dibawah rata-rata, kemudian dalam aspek komponen bangsa yang berasal dari unsur agama, terdapat beberapa Lembaga dengan unsur agama yang terpapar radikalisme dan terindikasi melakukan tindakan-tindakan intoleran.

Lemahnya National Building akibat kurangnya pemahaman nilai-nilai kebangsaan, indicator dari lemahnya National Building dalam aspek tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Intensitas pembelajaran atau pelatihan nilai-nilai kebangsaan selama pasca reformasi menurun yang mengakibatkan kurangnya wawasan kebangsaan dikalangan komponen bangsa.
2. Isi pelatihan dan metode pelatihan atau pembelajaran kurang efektif dan menarik belum sepenuhnya kekinian.
3. Sumber-sumber otentik sejarah masih sulit diakses sehingga masih ada kerugian terhadap sejarah.
4. Pada umumnya Kementrian Lembaga melaksanakan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan masih kurang terencana terstruktur dan terkoordinasi serta bersifat superfisial, kompartementalis.
5. Lemahnya daya nalar dan kritis masyarakat sejalan dengan masih dangkalnya literasi masyarakat.
6. Pengembangan secara ilmiah dengan pendekatan intradisiplin, multidispilin, dan transdispilin belum sepenuhnya digunakan untuk mengembangkan nilai-nilai kebangsaan.

**Tabel 1.4**  
**Tindakan Korupsi oleh Pejabat Publik Selama 2021**

No.	Pelaku	Pesentase	Bentuk
1.	Menteri	1%	a. Penyuapan b. Gratifikasi
2.	Kepala Daerah	5%	a. Gratifikasi b. Perbuatan curang
3.	ASN Pemerintah	65%	a. Pemasaran b. Penggelapan c. Penyuapan
4.	Aparat Hukum	5%	a. Pemasaran b. Penggelapan c. Penyuapan
5.	Jajaran BUMN Direksi	29%	a. Pemasaran b. Penggelapan c. Penyuapan

Sumber : KPK, 2022

Berdasarkan pada tabel tersebut, komponen bangsa yang diantaranya merupakan pejabat publik, dimana seharusnya mereka menjadi teladan bagi masyarakat justru terlibat beberapa pelanggaran yang mengakibatkan mereka berurusan dengan pelanggaran kode etik dan berujung pada Tindakan pidana seperti penyalahgunaan wewenang yang mengacu pada pemanfaatan jabatan tertentu untuk keuntungan suatu pihak maupun keuntungan pribadi, hingga Tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik sepanjang 2021 menyebabkan kerugian negeri sebesar Rp. 29.438 Triliun.

Menurut Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 09 Tahun 2021 “Lemhannas RI sebagai lembaga yang menyelenggarakan Pembinaan dan Pelaksanaan Program Taplai Kbs. guna meninggikan dan memperkuat wawasan kebangsaan guna menciptakan sifat sebuah bangsa. Melalui Kedeputusan Bidang Kebangsaan Lemhannas RI yang memiliki tanggung jawab melaksanakan program Pembinaan dan Pelaksanaan Taplai Kbs. juga menjalankan tugas di bidang pelatihan, pembinaan, dan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan bagi seluruh lapisan masyarakat dan Bangsa Indonesia”.

Program Pembinaan dan Pelaksanaan Taplai Kbs. merupakan kegiatan pelatihan Taplai Kbs. kepada komponen bangsa untuk menumbuhkan kesadaran kolektif, dan berpartisipasi aktif serta mampu menjadi duta perubahan untuk menjalankan dan mensosialisasikan nilai kebangsaan dan Paradigma Nasional dilingkungan masing-masing melalui kepemimpinan dan keteladanan. Lama pelaksanaan kegiatan ini melingkupi 26, 38, 61, dan 69 JP (Jam Pelajaran). Materi yang disampaikan meliputi materi dari Lemhannas RI yang sesuai dengan Kurikulum dan Rangka Pembelajaran Pokok atau penambahan materi di luar Lemhannas RI dengan ketentuan berlaku. Adapun jenis materi dari Lemhannas RI yaitu materi dasar, materi utama dan materi penunjang adalah sebagai berikut :

1. Materi Dasar diberikan dengan maksud mengingatkan kembali tentang paradigma nasional minimal terdiri dari, Wasantara, Tannas, Padnas dan Pimnas.
2. Materi Utama diberikan dengan maksud untuk menggugah kembali Nilai-Nilai luhur bangsa yang bersumber dari 4 kesepakatan bersama Bangsa, yaitu Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, Diskusi Kelompok serta Diskusi Antar Kelompok.

3. Materi Penunjang diberikan dengan maksud menggugah kepedulian peserta pada perubahan lingkungan strategis nasional, regional ataupun global yang sedang dan akan terjadi. Materi ini terdiri dari : pengantar pimpinan, pengantar program dan komitmen, binta, membangun bangsa melalui revolusi mental, pengantar nilai kebangsaan dan sejarah bangsa, kearifan lokal, petunjuk esai, naskah kelompok dan mekanisme diskusi, pembangunan tim (*team building*) / *Mancakrida (outbound)*, tes awal-tes akhir (*pretest-post test*).
4. Pembinaan Peserta (Binta). Binta dalam bentuk energizing dalam ruangan diberikan secara proporsional diantara waktu-waktu kritis seperti saat selesai makan siang, istirahat minum kopi sore dan saat tertentu untuk membuka celah komunikasi/*ice breaking*, pembangunan tim, pengantar diskusi dan lain-lain. (Pergub Lemhannas RI Nomor 09 Tahun 2021 tentang Pedoman Taplai 2021).

Penyelenggaraan Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan (Taplai Kbs) yang diselenggarakan oleh Lemhannas RI kepada seluruh lapisan masyarakat yang terdiri dari para kementerian/lembaga, kalangan birokrat, organisasi politik, akademisi, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, BUMN, anggota DPRD dan komunitas lainnya. Namun dalam penyelenggarannya tentunya dihadapkan dengan beberapa kendala diantaranya adalah keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana serta tenaga pendidik, sedangkan animo masyarakat untuk mendapatkan pendidikan di Lemhannas sangatlah tinggi. Penentuan peserta dilaksanakan secara selektif dan terpilih, karena para peserta akan menjadi teladan dan duta agen perubahan yang

mensosialisasikan Wawasan Kebangsaan setelah menjadi Alumni Taplai kbs.

Lemhannas RI (Lembaga Ketahanan Nasional Republik) adalah Lembaga Pemerintah Non Kemeterian yang berdasarkan undang-undang yang dibiayai didanai melalui system APBN. Pada aturan pelaksanaannya yang di tetapkan oleh Lemhannas RI, ditetapkan tentang dasar pelaksanaan APBN. Hambatan yang masih diperjuangkan oleh Lemhannas RI adalah anggaran (APBN) dan waktu untuk mendidik dan mensosialisasikan Nilai-nilai Kebangsaan kepada masyarakat Indonesia sangatlah terbatas. Anggaran pada kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan (Taplai Kbs) yang diselenggarakan oleh Lemhannas RI berasal dari beberapa sumber, yaitu :

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lemhannas RI sebagai sumber utama anggaran Penyelenggaraan Pembinaan dan Pelaksanaan Taplai Kbs. Pengelolaan anggaran tersebut mengikuti ketentuan pengurusan keuangan negara yang berlaku.
2. DIPA Kementerian/Lembaga (K/L) di luar Lemhannas RI. Anggaran pada DIPA tersebut dialokasikan untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka kegiatan Penyelenggaraan Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan (Taplai Kbs) bagi K/L tersebut. Pertanggung jawaban keuangan dilaksanakan oleh K/L bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tugas Lemhannas RI pada kerja sama tersebut hanya sebagai pelaksana kegiatan.
3. Anggaran Non DIPA. Anggaran tersebut bersumber dari kerjasama dengan pihak kedua selain K/L. Pengelolaan dan pertanggung jawaban administrasi keuangan dilaksanakan oleh pihak kedua. Tugas Lemhannas RI hanya sebagai pelaksana kegiatan



Penyelenggaraan Pembinaan dan Pelaksanaan (Taplai Kbs). Hal lebih rinci terkait kerjasama akan diatur pada Petunjuk Teknis Kerja Sama. (Pergub Lemhannas RI Nomor 09 Tahun 2021 tentang Pedoman Taplai 2021).

Penyediaan anggaran untuk pendidikan di Indonesia pada umumnya dan Lemhannas RI pada khususnya masih dibilang rendah dari negara di Asia Tenggara. Akibatnya berdampak terhadap mutu pada sector pendidikan. Pembinaan dan Pelaksanaan Taplai Kbs. dihadapkan berbagai masalah yang membutuhkan penanganan khusus untuk mengatasinya. Karena bukan tanggung jawab Lemhannas sendiri untuk Penyelenggaraan Pembinaan dan Pelaksanaan Taplai Kbs., dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi serius antara pemerintah, masyarakat, akademisi, kalangan pengusaha, serta lembaga penyiaran.

Kebijakan, inovatif, kreatifitas dan kolaborasi terus diupayakan dan dilakukan supaya program Pembinaan dan Pelaksanaan Taplai Kbs. dapan berjalan dengan efektif dan efisien serta memiliki dampak yang besar bagi bangsa Indonesia.

POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A

Gambar 1.2

Jumlah Alumni Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhannas RI

**ALUMNI**

PERIODE 2006-2022

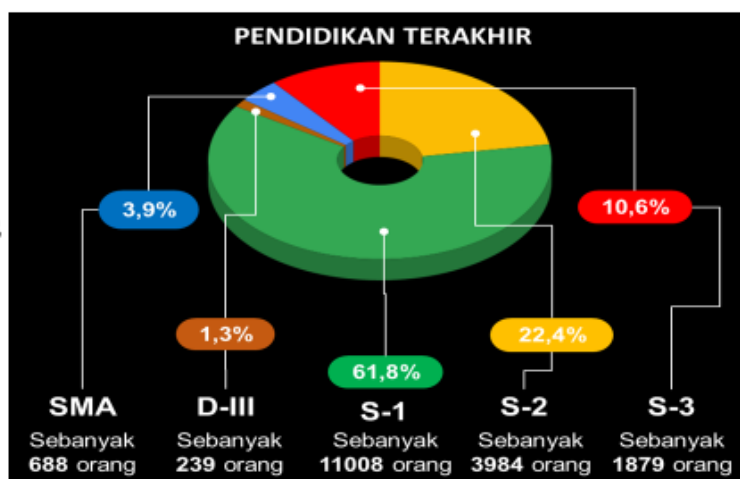
- 17.798 ORANG

S/D SEPTEMBER 2023

- 900 ORANG

**TOTAL =**

**18.698** orang



DEPUTI KEBANGSAAN LEMHANNAS RI 2023

11

Sumber : Lemhannas RI

Gambar 1.2 menunjukkan jumlah lulusan/Alumni yang mengikuti Taplai Kbs. yang tersebar diseluruh plosok negeri dari tahun 2006 sampai dengan September 2023 dengan jumlah sebanyak 18.698 orang alumni yang tercatat dalam daftar Alumni Taplai Kbs. dikedeputian Taplai Kbs. yang terdiri dari beberapa strata Pendidikan mulai dari lulusan SMA sampai dengan S3.

Guna menjamin keberlangsungan program Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan (Taplai Kbs) dibutuhkan kebijakan strategi penganggaran yang digunakan sebagai kiblat dalam managerial anggaran Pembinaan dan Pelaksanaan Taplai Kbs. Apabila dipandang dari banyaknya Penduduk Indonesia dari data BPS pada proyeksi 31 Desember 2021 sejumlah 273,87 juta jiwa serta kemampuan Lemhannas untuk melaksanakan Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan (Taplai Kbs) sampai sekarang ini baru

mencapai 19.604 orang, dibagi kemampuan mendidik Lemhannas dalam setahun sejumlah 4.500 maka untuk mencapai angka jumlah penduduk tersebut membutuhkan waktu selama 60.860 tahun. Dari segi anggaran untuk mendidik jumlah penduduk sebanyak 273,87 juta jiwa dikali biaya per orang Rp. 8.000.000,- maka dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 2.190.960.000.000,- atau Rp. 2.190,96 Trilyun. Dan ini bukanlah anggaran yang kecil. Rasanya tidaklah mungkin bisa dilaksanakan oleh Lemhannas RI secara mandiri dalam waktu yang sangat lama dan anggaran yang sangat besar, tetapi perlu dukungan dari seluruh unsur masyarakat Indonesia dan kepedulian yang kuat untuk mewujudkannya dalam waktu yang tidak begitu lama. Collaborative governance dapat digambarkan sebagai salah satu bentuk governance. Gagasan ini mengungkapkan pentingnya situasi dimana pemerintah dan pelaku bisnis bekerja sama dalam pola tertentu untuk menghasilkan hukum, aturan dan kebijakan yang tepat untuk rakyat. Bahasa ini menjelaskan bahwa pemerintah dan organisasi bisnis dan lembaga pemerintah bekerja sama untuk kepentingan masyarakat, daripada bertindak secara terpisah dan bekerja untuk diri mereka sendiri.”: Ansell dan Grash, 2007:545.

Program Pembinaan dan Pelaksanaan Taplai Kbs. akan berjalan dengan optimal jika berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti Perguruan Tinggi, K/L, media massa dan pengusaha atau juga bisa kita sebut Pentahelix. Pentahelix ini juga bermaksud keterkaitan semua elemen atau unsur dari masyarakat yang membantu proses Program Pembinaan dan Pelaksanaan Taplai Kbs. **Kolaborasi** adalah proses bekerjasama untuk menghasilkan pemikiran dan menuntaskan masalah secara bebarengan menuju mimpi bersama. Pada suatu organisasi yang saling membutuhkan, kolaborasi dapat pendobrak ide yang lebih inovatif. Kolaborasi itu cocok untuk mendapat solusi tepat saat mengakhiri permasalahan yang pelik. Pada kemajuan jaman

terdapat bentuk kerjasama dari yang lebih sederhana terdiri dari 2 pihak, kemudian meluas menjadi 3, 4, dan hingga 5 pihak.

**Gambar 1.3**  
**PERCEPATAN DAN PERLUASAN TAPLAI KEBANGSAAN**  
**Peran Dalam Percepatan dan Perluasan TAPLAI**



Sumber : Lemhannas RI

Dengan memperhatikan banyaknya dinamika yang ditemukan di lapangan terhadap Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan (Taplai Kbs) pada seluruh anak bangsa guna mendukung pembangunan nasional, maka diharapkan stakeholder terkait dapat mengambil kebijakan yang tepat agar mampu mengakomodir semua kepentingan dan permasalahan yang muncul dan proses Program Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan (Taplai Kbs) bisa berjalan dengan efektif, sehingga beberapa catatan usulan yang bisa disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Sekjen DPR, Bappenas, Lemhannas RI, BPIP, Wamtanas, Kemenhan, Kemenko PMK, Kemendagri perlu membangun sinergitas dan kolaborasi terhadap Program Pembinaan dan

Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan (Taplai Kbs) mulai dari perencanaan, pengawasan, pelaksanaan dan evaluasi dengan agenda baru atau memanfaatkan agenda yang sudah terprogram seperti musyawarah perencanaan pembangunan nasional.

2. Perlunya DPR mendukung regulasi/peraturan terkait dengan pembelajaran orang dewasa dalam Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan (Taplai Kbs) dalam dunia kerja, sehingga menjadi salah satu upaya mereduksi terjadinya pelemahan terhadap pemahaman nilai kebangsaan.
3. Perlunya *Stakeholder* terkait seperti Lemhannas maupun BPIP membangun roadmap pembelajaran orang dewasa dalam Taplai Kbs, baik dalam instansi yang bersifat publik maupun privat, sehingga penanaman nilai-nilai kebangsaan tidak berhenti pada tingkatan Pendidikan formal dan terus berjalan hingga memasuki dunia kerja.
4. Perlunya DPR menjadi *leading sector* dalam menciptakan iklim politik yang membuka peluang sebesar-besarnya bagi warga masyarakat untuk terlibat dan berpartisipasi dalam proses penentuan kebijakan yang berhubungan dengan SARA, sehingga masyarakat dapat mengawasi dan menjadi bagian dari dampak kebijakan implementasi nilai-nilai kebangsaan yang di implementasikan, sehingga diperlukan regulasi yang kuat dalam penanaman nilai-nilai kebangsaan.
5. Bappenas, Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksaan Keuangan dan Kemenpan RB mendukung pembiayaan mandiri program kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan (Taplai Kbs) yang diberikan oleh organisasi berbadan

hukum kepada Kementerian /Lembaga sebagai penyelenggaranya dengan mempermudah / mempercepat proses birokrasi dan pertanggung jawabannya.

6. Peneliti memberikan solusi dengan konsep Kolaborasi Pentahelix yaitu sebagai solusi bersama untuk menyatukan seluruh unsur sebagai pelaksana dan pendukung Program Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan (Taplai Kbs) dari segi Perencanaan, Anggaran, SDM, Publikasi dan Sosialisasi tentang pentingnya program Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Taplai Kbs.

Dari beberapa pertimbangan tersebut, Lemhannas RI dianggap layak untuk dijadikan sebagai objek penelitian pada penerapan Model *Pentahelix Collaborative Governance* Dalam Strategi Pembiayaan Program Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan (Taplai Kbs) untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

## **B. Identifikasi Masalah.**

Permasalahan yang tertuang dalam Latar Belakang, memberikan pemahaman akan pentingnya peran para pihak dalam mendorong Strategi Pembiayaan Program Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan (Taplai Kbs) sehingga lebih optimal, dan berdampak positif bagi Pembangunan Nasional. Adanya permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah :

1. Lemahnya Pemahaman, Pengetahuan dan Implementasi nilai-nilai kebangsaan pada komponen bangsa.
2. Kurangnya dukungan dari Pemerintah Pusat dan Daerah serta Stakeholder lainnya dalam hal dukungan Pembiayaan

Program Taplai Kbs. yang berdampak pada jumlah anggaran yang diberikan kurang optimal.

3. Kurangnya publikasi dari Media Massa tentang pentingnya program Taplai Kbs. yang diselenggarakan oleh Lemhannas RI, sehingga berdampak pada kurang pahamnya pemerintah dalam memperhitungkan besaran kebutuhan Riil pembiayaan program Taplai Kbs.
4. Lemahnya marketing dan sosialisasi tentang pendidikan Taplai Kbs. oleh Lemhannas RI, yang berampak Program Taplai Kbs. dianggap hanya pendidikan biasa.
5. Lemahnya informasi untuk bisa kerjasama dengan Lemhannas RI tentang Pendidikan Taplai Kbs.

Hal ini yang mendorong dan perlunya beberapa pihak yang dapat membantu Lemhannas RI dalam hal khususnya pembiayaan guna percepatan menyebarkan dan memperluas pemahaman tentang Wawasan Kebangsaan serta Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan keseluruhan lapisan Masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan perubahan yang mempercepat diseminasi, menumbuhkan pemahaman visi nasional dan memperkuat nilai-nilai kebangsaan, tentu tidak bisa kita lakukan sendirian. Oleh karena itu kerjasama antar pihak penting dilakukan untuk mencapai tujuan bersama dengan memaksimalkan konsep pentagon yang mencakup peran ganda. Pentahelix atau multi-stakeholder merupakan elemen kolaboratif yang mempertemukan berbagai pihak antara lain akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintah, dan media (ABCGM).

Konsep pentahelix yang menggabungkan peran akademisi, badan usaha (bisnis), komunitas, pemerintah, dan media adalah strategi untuk membantu tugas Lemhannas RI dalam percepatan menyebarkan dan

memperlas pemahaman tentang Wawasan Kebangsaan serta Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan. Dengan menemukan pola kemitraan khususnya pembiayaannya, maka perlu melibatkan berbagai pihak dan peran, tujuan tersebut juga mendukung terwujudnya tujuan Pembangunan Nasional.

Pembiayaan Program Pembinaan dan Pelaksanaan Taplai Kbs. adalah masalah klasik dan masih diperjuangkan terus oleh Lemhannas RI karena keterbatasan anggaran yang dialokasikan Pemerintah melalui alokasi Anggaran atau DIPA Lemhannas RI. Konsep pentahelix merupakan strategi untuk mengatasi permasalahan dan mengembangkan program dengan melibatkan berbagai sektor untuk berbagi peran. Inti dari Pentahelix adalah kolaborasi Lemhannas RI dengan pemangku kepentingan dan masyarakat, khususnya seputar solusi keuangan.

### **C. Rumusan Permasalahan**

Hambatan yang tertuang dalam Identifikasi Permasalahan tersebut, bermuara pada rumusan permasalahan yaitu:

Beberapa identifikasi permasalahan tersebut, bermuara pada rumusan permasalahan yaitu:

1. Faktor apa saja yang menghambat dan mendukung Pembiayaan Program Pembinaan dan Pelaksanaan Taplai Kbs. di Lemhannas RI?
2. Bagaimana Strategi Pembiayaan Program Pembinaan dan Pelaksanaan Taplai Kbs. dengan Model *Pentahelix Collaborative Governance*?



#### D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor penghambat dan pendukung Pembiayaan Program Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan (Taplai Kbs) di Lemhannas RI.
2. Menyusun Strategi Pembiayaan Program Pembinaan dan Pelaksanaan Taplai Kbs. yang efektif dengan Model *Pentahelix Collaborative Governance*.

Guna mencapai tujuan penelitian maka penting pelibatan unsur-unsur *Pentahelix*, yang dapat memberikan data dan informasi, pengetahuan, wawasan dan solusi terkait realita dalam Program Pembinaan dan Pelaksanaan Taplai Kbs. sehingga dapat dijadikan bahan analisis dalam rekomendasi kebijakan terkait perbaikan Tata Kelola Kolaborasi Program Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan (Taplai Kbs) di Lemhannas RI. Pentingnya *Pentahelix* dalam sosialisasi guna meningkatkan pembiayaan Program Pembinaan dan Pelaksanaan Taplai Kbs. adalah dengan sosialisasi Program Pendidikan Taplai Kbs. maka semakin sering muncul di Media Massa maka semakin menambah pengetahuan dan pemahaman serta berdampak pada Implementasi Nilai-nilai Kebangsaan dalam Masyarakat maka tujuan pembangunan nasional akan cepat tercapai dengan semakin tinggi Tingkat SDM yang memiliki moral dan etika kebangsaan yang tinggi.

## E. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Peneliti. Untuk menghasilkan bahan tesis yang merupakan syarat guna mencapai gelar Master Administrasi Pembangunan di Politeknik STIA LAN Jakarta.
2. Bagi Lemhannas RI. Memberikan masukan bagi Lemhannas RI tentang Model Pentahelix *Collaborative Governance* Dalam Strategi Pembiayaan Program Pembinaan dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan (Taplai Kbs) sebagai solusi permasalahan Lemhannas RI.
3. Bagi Akademik. Riset ini dapat dimanfaatkan untuk para penelitian lebih lanjut guna menambah informasi, cakrawala dan data tentang Model Pentahelix *Collaborative Governance* Dalam Strategi Pembiayaan pada setiap program unggulan yang membutuhkan pembiayaan yang besar tapi anggaran yang tersedia tidak cukup.

POLITEKNIK  
STIA LAN  
JAKARTA